

Pola Komunikasi untuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Program Swasembada Pangan

Patterns of Communication for Empowerment Group Information Society in Food Self Sufficiency Program in The Successful

Syarif Budhirianto

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung
Jln. Padjajaran No. 88 Bandung 40173 Telp. (022) 6017493 Fax.(022) 6021740

syarifbudhi @gmail.com

Diterima: 10 Juni 2015 | | Revisi: 30 Juni 2015 | | Disetujui: 7 Juli 2015

Abstrak - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan lembaga komunikasi nonformal di daerah mempunyai peran strategis di masyarakat, tetapi keberadaannya belum bisa mengakomodir program swasembada pangan seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Hal ini karena pola komunikasi terpadu antara masyarakat dengan unsur *stakeholder* di daerahnya belum terbangun secara sinergis, serta belum terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini. Fokus kajian ini mengungkap bagaimana pola komunikasi yang tepat untuk pemberdayaan KIM dalam menyukkseskan program swasembada pangan. Tujuannya adalah terbangunnya suatu pola komunikasi KIM yang lebih baik dalam menghadapi program tersebut. Penelitian menggunakan paradigma studi kasus dengan pendekatan kualitatif, kemudian disusun suatu penguatan pola atau model komunikasi yang tepat dalam menghadapi program tersebut. Subyek penelitian adalah masyarakat dan para *stakeholder* setempat yang dipandang memahami masalah penelitian ini. Lokasi adalah KIM Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan pola pemberdayaan komunikasi KIM adalah dengan model komunikasi pendampingan yang lebih terarah dari para *stakeholders* dan mengembangkan komunikasi kelompok yang lebih demokratis kepada para anggotanya. Pola komunikasi linier (sinergi) secara *top down* dan *bottom up* antara KIM dengan para *stakeholder* yang kompeten perlu penguatan untuk memberikan pemahaman yang benar dalam berkomunikasi.

Kata Kunci: pola komunikasi, KIM, swasembada pangan.

Abstract - *Public Information Group (KIM) is an informal communication agencies in the area have strategic role in society, but its existence can not accommodate such food self-sufficiency program launched by President Joko Widodo. This is because the pattern of integrated communication between the community and regional stakeholders element synergistically undeveloped, and yet awakening public awareness of the importance of this program. The focus of this study reveal how patterns of communication for empowerment of KIM in the success of food self-sufficiency program, the aim is the establishment of a communication pattern KIM better in the face of the program. Research using the paradigm case study with a qualitative approach, then compiled a strengthening pattern or model appropriate communication in the face of the program. Subjects were community and local stakeholders were deemed understand the problems of this research. The location is KIM Palasari, Palasari Village, District Cilengkrang, Bandung regency. Results showed a pattern empowerment KIM communication is communication model with more targeted assistance from stakeholders and develop a more democratic group communication to its members. Linear communication patterns (synergies) are top down and bottom up between KIM with competent stakeholders need strengthening to provide a correct understanding of communication.*

Keywords: communication patterns, KIM, food self-sufficiency.

PENDAHULUAN

Peran komunikasi berbasis komunitas seperti KIM sangat strategis peranannya dalam mendapat informasi dan komunikasi yang dibutuhkan masyarakat. Martin Buber berpendapat komunikasi dalam kelompok adalah faktor penting dalam pengembangan suatu komunitas, karena dalam dialog perasaan untuk mengontrol dan memiliki sesuatu dapat diminimalisir, tiap partisipan menerima

keberadaan lawan bicaranya, bahkan saat terjadinya konflik.(Guddykunst: 2003).

KIM sebagai lembaga komunikasi nonformal di daerah, adalah pilihan tepat untuk menyukkseskan program swasembada pangan (*sustainability*), karena dengan potensi informasi yang dimiliki masyarakat akan terintegrasi dalam pencapaian informasi yang kolektif, baik berbasis komunikasi komunitas ataupun berbasis media. Apalagi proses yang dilakukan tidak

secara parsial, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di sana, sehingga tidak menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian saja, tetapi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Keberadaan KIM memiliki peran penting sebagai fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (*bottom up*). Lain halnya dengan kelompok struktural di lembaga pemerintahan yang terbentuk secara instan yang diturunkan melalui kebijakan pemerintah atau suatu kelompok yang menjalankan proyek pemerintah (*top down*), seperti LMD, PKK, JPS, IDT, KUD, dan lain-lain, dimana dianggap sebagai bagian perangkat organisasinya.

Pemberdayaan (*empowerment*) KIM adalah upaya penguatan dalam konsep komunikasi sehingga kedudukan di masyarakat lebih optimal. Pemberdayaan melibatkan berbagai *stakeholders*, meliputi pemerintah, swasta, media massa, lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat lainnya, dalam merekonstruksi kembali keberadaannya yang lebih baik. Pendekatan dalam *empowerment* KIM ini disesuaikan dengan karakteristik komunitas di wilayahnya untuk mengintervensi segala hambatan yang dihadapi, seperti rendahnya: (1). Tingkat pemahaman komunitas terhadap nilai informasi; (2). Jaringan informasi dan komunikasi dengan pihak luar; (3). Kepedulian terhadap sarana prasarana yang dimiliki, dan (4). Memahami lintasan peluang (Suriyanto:2014). Gejala munculnya kelompok tersebut karena adanya suatu kecenderungan manusia yang memiliki hasrat untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan juga keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya (Suhardiyono:1992).

Kemenkominfo sebagai fasilitator untuk berkomunikasi dan memberi informasi dalam komunitas bersama guna mengakomodir segala kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Pasal 1(5): Lembaga komunikasi organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya. Problem utama pembentukan lembaga komunikasi ketahanan pangan terletak pada orientasi yang kurang memberi

solusi strategis dari pemerintah dan kurang memberikan stimuli dan insentif pembangunan pertanian berbasis dalam negeri sebagai fasilitator penopang utama ketahanan pangan nasional (Kemenkominfo,Dirjen IKP:2011)

Fungsi komunitas KIM dalam meningkatkan hasil produk pangan belum dipahami secara kolektif oleh masyarakat petani, termasuk pada KIM Palasari yang berlokasi di pinggiran Kota Bandung menganggap program swasembada pangan yang ditarget tiga tahun, oleh masyarakat petani umumnya disikapi biasa-biasa saja, padahal fungsi wadah ini sangat penting. Belum adanya tokoh informal dan formal dalam membuat pola komunikasi yang efektif merupakan persoalan di daerah ini dalam menyatukan persepsi para petani untuk membangun sistem ketahanan yang mandiri. Sebab selama ini, komunikasi yang dilakukan oleh para kelompok tani yang sudah ada lebih berorientasi pada sistem mekanisasi pertanian yang berbasis urusan ketersediaan (*availability*), tanpa memberi orientasi yang lebih dalam tentang dinamika kemajuan pertanian yang sedang dihadapi. Era sekarang seakan kebebasan bertani diserahkan kepada petani, ini dirasa menjadi kurang tearah untuk peningkatan kesejahteraan individu petani ataupun untuk tujuan yang lebih makro.

Keberadaan KIM Palasari yang sampai saat ini masih beraktifitas sebagai media informasi dan komunikasi bagi masyarakatnya, belum bisa mengakomodir secara khusus untuk menyukseskan program swasembada pangan. Bahkan KIM itu sendiri tidak berdaya untuk meyakinkan masyarakat petani dan masyarakat lainnya untuk memertahankan lahan pertanian yang banyak dikonversikan menjadi lahan properti dan pembangunan infrastruktur, serta akibat dari alih fungsi lahan, perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Keadaan tersebut merupakan tantangan serius bagi masyarakat kedepan untuk mewujudkan swasembada pangan, dimana Indonesia sendiri pernah mencapai swasembada pangan terutama beras pada 1984, dan setelah itu sampai sekarang (2015) tidak bisa memertahankan lagi karena banyak infrastruktur pertanian yang berkurang. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad, agar prestasi yang pernah dicapai, bisa dilakukan dengan tenggat waktu tiga tahun dari sekarang. Untuk merealisasikan target itu, seluruh kementerian dan lembaga harus menyukseskannya tanpa kecuali, karena untuk melakukannya tidak semudah membalikan telapak

tangan, perlu keseriusan bersama untuk kemandirian pangan dari impor luar negeri.

Pemberdayaan pola komunikasi dan informasi dalam KIM Palasari ini urgen dilakukan untuk memberi nilai tambah dalam menghadapi program ini, seperti dikemukakan Lionberger dan Gwin (1982), bahwa pola komunikasi dalam penyebaran informasi pertanian perlu melibatkan 4 sub sistem, yakni: sub sistem ilmuwan dasar, sub sistem ilmuwan aplikasi, sub sistem penyuluhan (komunikasi), dan sub sistem sosial pemakai (petani pengguna informasi).

Berdasar pada latar belakang yang diungkap, maka fokus pertanyaan mendasar yang muncul dalam penelitian adalah pola komunikasi seperti apa yang diharapkan dalam *empowerment* KIM mendatang, agar masyarakat bisa menyukseskan program swasembada pangan. Tujuan penelitian adalah terbangunnya suatu pola komunikasi pada KIM yang lebih baik dalam mencari solusi terbaik menyukseskan

program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan manfaatnya adalah: (1). Menghasilkan pola komunikasi KIM yang lebih terarah yang dipandang memiliki kesesuaian dan keberlanjutan dalam menyukseskan program swasembada pangan, sehingga Kemenkominfo melalui Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) serta stakeholders lainnya mempunyai *policy* dalam pengembangan dan pemberdayaan lembaga KIM di daerah; (2). Bagi masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat (komunitas) pertanian lainnya secara praktis dapat dijadikan referensi dalam mengaplikasikan pola komunikasi yang lebih baik.

Adapun penelitian yang dilakukan orang lain yang berkaitan dengan pola komunikasi komunitas petani banyak dikaji, namun ada dua hasil penelitian yang sejenis sebagai bahan komparasi, seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 *Review* Penelitian Sejenis

JUDUL	PARADIGMA	MASALAH	HASIL
Hubungan Antara Kemampuan Komunikasi Kelompok dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan efektivitas Pelaksanaan Program IDT (penelitian PPS Unpad oleh Atom Ginting Munthe, Tahun 1999	Metode kuantitatif dengan alat analisis statistik	Pemaknaan pemberdayaan masyarakat, proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat, pemaknaan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, model komunikasi pemberdayaan masyarakat.	Program IDT di Kab. Ciamis belum efektif. Kepala desa belum memiliki kemampuan mengkonstruksi komunikasi dengan masyarakat sehingga gagal memaksimalkan dukungan aparatnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Komunikasi <i>Empowerment</i> Masyarakat Tani(kajian komunikasi dalam kelompok tani, suatu kasus di desa Sidomulyo oleh Indardi, 2013	Kuantitatif-kualitatif interpretif (studi kasus tunggal dengan teknik analisis deskriptif dan konvergensi simbolik untuk <i>small group</i>)	Pemaknaan pemberdayaan masyarakat, proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat, pemaknaan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, model komunikasi pemberdayaan masyarakat.	Program pemberdayaan masyarakat petani diperlukan suatu model komunikasi dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga dapat menciptakan kolaborasi sosial yang saling terhubung dalam jaringan masyarakat petani itu sendiri.
Pola Komunikasi Untuk Pemberdayaan KIM Dalam Menyukseskan Swasembada Pangan, oleh Syarif Budhirianto, Tahun 2015	Analisis Kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif induktif	Mengkonstruksi (<i>construct</i>) dan <i>empowering</i> pola komunikasi pada kelompok tani yang telah ada dalam menyukseskan program kedaulatan pangan/swasembada pangan	Pola komunikasi yang dikonstruksi melalui para <i>stakeholders</i> kepada komunitas petani dilakukan dengan komunikasi kelompok yang lebih terarah dan terintegrasi. <i>Empowering</i> komunitas kelompok tani yang sudah ada (KIM) perlu dipertahankan dengan paradigma komunikasi yang optimal.

Sumber: hasil penelitian dari Munthe:1999&Indardi:2011.

Penelitian terdahulu, menggambarkan bahwa pola pemberdayaan KIM di Desa Palasari perlu dibangun suatu konsep komunikasi dan informasi dengan model pendampingan oleh para *stakeholder* yang lebih

terarah dan profesional, serta perlu mengembangkan pola komunikasi secara sinergi dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya untuk menyukseskan program swasembada pangan.

Sedangkan pada dua jenis penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada aspek pola komunikasi yang dihadapi oleh intern komunitas kelompok informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat petani, serta lebih ditekankan pada pola komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat untuk menciptakan kolaborasi sosial dalam komunitas petani tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yakni berkaitan dengan fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian disusun suatu pola atau model komunikasi dalam komunitas petani. Yin (2005), langkah penyelenggaraan penelitian dengan pendekatan studi kasus ini terutama mengacu mulai dari kegiatan persiapan pengumpulan data, pelaksanaan pengumpulan data, tahap analisis, selanjutnya dilakukan generalisasi (induktif), dan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian dan model. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah wawancara, literatur/dokumen, arsip berkaitan penelitian ini, dan observasi langsung.

Lokasi penelitian adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Palasari, di Desa Palasari, Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung. KIM tersebut memperoleh predikat KIM terbaik di tingkat Provinsi Jawa Barat serta sering menjadi rujukan bagi KIM lainnya. Subyek penelitian adalah 8 *stakeholders* yang dipandang memahami betul dengan fokus penelitian ini, serta mempunyai kompetensi dalam usaha swasembada pangan, yakni: Herdiana Yunus, Kepala Bidang Desiminasi dan Informasi Diskominfo Kota Bandung; Andi Sukarjo Camat Cilengkrang; Siti Aisyah Kepala Desa Palasari; Susi Sugiarsi Ketua Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Palasari; Santi Wulandari Wakil Ketua KIM; Mamat anggota KIM; Mohamad Soleh Iskandar (masyarakat sekitar); dan Toharuddin (tokoh masyarakat Kecamatan Cilengkrang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Informasi Masyarakat dengan Penguatan Komunikasi Komunitas

Membangun kedaulatan pangan yang mandiri menuju swasembada pangan sesuai dengan program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi perlu diwujudkan seluruh masyarakat Indonesia.

Tanggungjawab membangunnya, tidak dipikul masyarakat petani saja, tetapi seluruh masyarakat serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Mulai petani sebagai eksekusi di lapangan, masyarakat pendatang, masyarakat pemilik lahan, masyarakat sadar keluarga berencana, sampai mereka pemilik modal mempunyai kesamaan persepsi atau pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya tonggak kedaulatan pangan di negeri sendiri, tanpa menggantungkan dari luar negeri.

Mewujudkan program ini sebagai basis kekuatan pangan di negeri sendiri, peran dari masyarakat setempat memegang peranan penting, yakni pemerintah daerah sebagai regulator ataupun masyarakat yang langsung bersinggungan dengan sistem pengolahan lahan pertanian. Dengan tergabungnya dalam kelompok masyarakat tersebut, akan menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan informal yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat sendiri, yang mempunyai fasilitas komunikasi yang dikelola oleh sukarelawan masyarakat penduduk lokal maupun oleh pemerintah dan swasta yang menjadi fasilitator dalam membuat kebijakan yang berafiliasi pada peningkatan produktifitas pangan.

KIM Palasari adalah lembaga layanan publik non formal yang berperan dalam peningkatan akses informasi dan komunikasi pembangunan pada masyarakat dan pemerintah. Keberadaan lembaga ini dibentuk 23 April 2000 (waktu itu lokasi masih berada di Kab. Bandung), diinisiasi oleh pemerintah dan tokoh masyarakat setempat awal reformasi bergulir (sebelumnya kelompencapir) dan diharap dapat meningkatkan potensi masyarakat yang sehat, cerdas dan mendidik.

“KIM dibentuk karena masyarakat kurang mendapatkan informasi dan koordinasi berkomunikasi dengan pihak luar, peran dari lembaga komunikasi baik formal atau nonformal belum dirasakan secara langsung, padahal di daerahnya acapkali sering juga dikunjungi oleh petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan kunjungan komunitas lainnya. Kalaupun ada, hanya didasarkan pada kebiasaan atau rutinitas bekerja, kedekatan hubungan, dan bersifat proyek-proyek yang ada dari atas. Oleh karena itu diperlukan wadah ini sebagai pengkayaan informasi dan komunikasi diantara mereka, walaupun dalam perkembangan perlu dievaluasi menjadi KIM yang berkemampuan menyediakan komunikasi dan informasi tentang program swasembada pangan secara teratur dalam rangka

saling tukar menukar informasi, serta sisi pendekatan komunikasi perlu dibangun ke arah mitra dialog yang lebih baik lagi dengan seluruh pemuka masyarakat dan aparat pemerintah yang ada” (Wawancara dengan Susi Sugiarsi Ketua Pengurus KIM Palasari Desa Palasari Kecamatan Cilengkrang, Jl Cilengkrang I/21, 12/2/15)

Konteks dinamika informasi dan komunikasi paska reformasi sekarang ini, keberadaan KIM Palasari perlu beradaptasi dengan dinamika tuntutan masyarakat serta kemajuan berkomunikasi, oleh karena itu pola komunikasi yang sudah terbentuk ditingkatkan dalam mengangkat permasalahan substantif serta bersama-sama dengan para *opinion leader* atau *stakeholder* yang mempunyai kompetensi di bidangnya untuk mendukung program pemerintah. Inisiasi komunikasi yang berbasis komunitas penting dilakukan sebagai pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*) dalam menghadapi tuntutan revitalisasi di bidang swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini akan menentukan suatu harapan besar bagi masyarakat petani sebagai garda terdepan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, manakala sistem komunikasi yang dibentuk mempunyai dinamika yang baik guna mengadopsi informasi yang dibutuhkan.

Sebagai pembuka pintu gerbang komunitas yang peduli akan program swasembada pangan, diperlukan *opinion leaders/ stakeholders* sebagai penggerak potensi sumber daya manusia (SDM) daerah tersebut dalam merekonstruksi sebuah komunitas yang produktif. Hal ini sesuai dengan teori kehadiran sosial (Griffin:2006), komunikasi efektif bila memiliki *opinion leadership* yang yang dibutuhkan masyarakat untuk tingkat keterlibatan interpersonal yang diperlukan. komunikasi tatap muka dalam kelompok dianggap memiliki kehadiran sosial yang ditulis atau komunikasi berbasis media baru, adalah yang masih rendah.

Bentukannya didasarkan kemandirian yang dibentuk dari, oleh, dan untuk kesejahteraan bersama anggota yang akan memahami pentingnya arti berkomunikasi dan akses informasi. Pola komunikasi yang diterapkan adalah dengan pendekatan interaksi sehari-hari atau diskusi bersama untuk saling bertukar informasi dalam menyebarkan informasi pertanian baik secara formal maupun informal. Karena karakteristik masyarakat di daerah adalah sifat kebersamaannya tinggi, saling membantu antara satu dengan lainnya, ini tidak lepas dari kultur komunikasi

yang terbangun secara kolektif dalam komunitas yang ada. Seperti dikemukakan oleh Kepala Bidang Kominfo:

“ Dalam dimensi membangun kedaulatan pangan yang mandiri menuju swasembada pangan sesuai program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi perlu diwujudkan seluruh masyarakat Indonesia. Tanggungjawab membangunnya, tidak dipikul oleh masyarakat petani saja, tetapi seluruh masyarakat setempat serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang merasa bersinggungan dengan program pemerintah ini. Mulai petani sebagai eksekusi di lapangan, masyarakat pendatang, masyarakat pemilik lahan, masyarakat sadar keluarga berencana, sampai mereka pemilik modal mempunyai kesamaan persepsi atau pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya tonggak kedaulatan pangan di negeri sendiri, tanpa menggantungkan dari luar negeri. Oleh karena itu fungsi dari KIM yang ada perlu diberdayakan lagi, yakni dengan suatu sistem komunikasi dan informasi yang lebih terfokus dan terorientasi secara profesional, karena keberadaannya berbeda dengan lembaga komunikasi di pemerintahan (kecamatan, kelurahan/desa) yang hanya menjalankan kebijakan pemerintah (top down) saja. (Wawancara dengan Herdiana Yunus, Kepala Bidang Desiminasi dan Informasi Diskominfo Kota Bandung,13/2/15).

Untuk mewujudkan program kedaulatan pangan sebagai basis kekuatan pangan di negeri sendiri,

“Peran KIM sebagai lembaga nonformal di daerah masih memegang peranan penting, andaikan ada pemberdayaan lebih lanjut oleh *opinion leaders*. Masyarakat dituntut untuk kreatif dan inovatif menghadapi tuntutan dan kebutuhan di bidang swasembada pangan, dan harus ada perubahan dengan paradigma KIM terdahulu maupun dengan komunitas tani lainnya baik formal ataupun nonformal. Sebab bila tidak, keberadaannya dinilai biasa-biasa saja atau tidak mempunyai keistimewaan tertentu untuk melakukan bergaining dengan masyarakat. Terutama dalam merubah pola komunikasi yang terarah lagi, yakni mampu untuk bersinergi dengan semua kalangan, baik top down atau bottom up. (Wawancara Siti Aisyah Kepala Desa Palasari di Kantor Desa Palasari, 12/2/15)

Mengkonstruksi wadah komunikasi komunitas baru selain yang telah ada, diperlukan adanya tiga prinsip pemberdayaan dalam proses komunikasi yang berbasis kemasyarakatan, yaitu: (1). Penguatan-penguatan (*empowering*) dalam karakteristik yang lain yang mampu lebih berperan dalam peningkatan

akses informasi dan komunikasi, yakni dapat membuat strategi komunikasi yang berkembang dan memiliki strategi unggulan dalam mendukung suatu program swasembada pangan; (2). Kemampuan (*enabling*) dalam membantu masyarakat, agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, dan mampu merumuskan program kedaulatan/swasembada pangan secara baik; (3). Perlindungan (*protecting*) yang mendorong terwujudnya tatanan struktural masyarakat petani dan mampu melindungi/mencegah yang lemah agar terbuka kerangka pikirnya (*meansheet*). (Kartasasmita:1996). Bersinggungan dengan kenyataan tersebut,

“Bahwa eksistensi KIM yang ada perlu diperkuat peranannya sebagai penggerak di bidang pertanian, serta sebagai garda terdepan untuk memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam meningkatkan produktifitasnya, tanpa adanya atensi masyarakat di bidang ini, maka profesi bidang ini semakin ditinggal masyarakat ditengah-tengah pembangunan fisik/infrastruktur. Para stakeholders sebagai inisiator tidak perlu membentuk wadah komunitas petani baru dalam menyukseskan program kedaulatan pangan ini, karena yang diperlukan adalah penguatan kembali dalam berkomunikasi melalui kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kelompoknya, disamping itu diperlukan figur yang ideal yang menguasai teknologi pertanian serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memahami dinamika pertanian. Apalagi lokasi KIM Palasari sekarang ini yang berada di pinggir kota Bandung yang masih banyak tersisa lahan pertanian/sawah, sekarang ini sudah menjadi incaran para investor untuk beralih fungsi lahan komersil” (wawancara Andi Sukarjo Camat Cilengkrang, Jl. Cibiru 12, 13/2/15).

Lebih jauh hasil wawancara dengan pengurus KIM,

“Walaupun umumnya masyarakat petani menyikapi program swasembada pangan biasa-biasa saja, keberadaan komunitas petani dalam keanggotaan KIM serta kelompok tani lainnya, adalah perlu diberdayakan secara optimal (tidak perlu dibentuk komunitas petani baru lagi) sesuai dengan tuntutan kebutuhan pangan yang setiap waktu meningkat. Demikian pula pola komunikasi, mindset atau cara berpikir para petani lebih dibina sebaik mungkin, sehingga ada perubahan dinamika yang revolusioner dibanding dengan komunitas sebelumnya. Proses pendampingan kepada petani dari pihak yang kompeten juga harus dilakukan, baik dari pemerintah daerah, lembaga swadaya

masyarakat bahkan dari perguruan tinggi, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) terhadap para petani dalam meningkatkan produktifitasnya. Di sisi lain, kami menyambut baik dengan upaya pemerintah Kota Bandung yang akan dijadikan daerah ini untuk dipertahankan menjadi lumbung padi di masa depan, sehingga tidak beralih fungsi ke nonpertanian”. (Wawancara dengan Santi Wulandari Wakil Ketua KIM, Jl. Cilengkrang I/2, 12/2/15).

Konteks *empowering* komunitas petani yang ada, juga dari unsur masyarakat sekitar menyatakan bahwa model atau pola komunikasi diperlukan penguatan-penguatan sesuai dengan paradigma pertanian yang dibutuhkan, yakni dengan pengembangan jaringan kerjasama para *stakeholders* berkompeten sebagai pendamping, agar dalam aktivitas lebih terarah. Hal ini seiring pendapat Hariadi (1998), bahwa sistem komunikasi yang diwadahi dalam kelompok tani, berfungsi sebagai forum belajar, media bekerjasama antara anggota kelompoknya, di mana umumnya para petani di kita adalah petani kecil yang memiliki keterbatasan baik modal, pengetahuan, pendidikan dan sebagainya.

Karakteristik cara pandang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (sosio-budaya) yang umumnya dianut para petani, dipandang perlu dirubah kearah yang lebih maju lagi, sehingga peran komunikasi dari ketua kelompok (komunitas) dituntut gaya komunikasi yang lebih lugas, setidaknya memberi spirit baru bagi anggota untuk ikut serta menyukseskan program kedaulatan pangan/swasembada pangan yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan (*sustainable*)

Begitu pula dalam pemanfaatan TIK dalam kelompok komunitas, lebih bisa beradaptasi dengan media dan sarana berkomunikasi yang multifungsi, yakni dalam pembentukan jaringan komunitas lintas masyarakat untuk diberdayakan menjadi bagian pelaku pembawa pesan. Selain itu, dapat mewujudkan fungsi strategis pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai wahana informasi yang berbasis internet.

Pola Komunikasi Pemberdayaan KIM

Pola atau model komunikasi pada KIM Palasari memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing terkait dengan konteks masanya. Berbagai penguatan model komunikasi yang pernah atau sedang dilakukan, baik pada masa sebelum era reformasi

(cenderung terpusat dan *top down*) maupun pada masa awal reformasi (*laize faire*) menjadi kurang relevan, dan dalam perkembangan selanjutnya pada masa reformasi memasuki era otonomi daerah lebih bersifat *bottom-up*.

Situasi politik banyak berperan dalam pergeseran paradigma dalam komunikasi pembangunan di Indonesia, seperti dikemukakan oleh Syam (2002): Selain pergeseran paradigma yang bersifat teknis/teknologi, pergeseran paradigma ini juga diakibatkan oleh adanya situasi politik. Seperti pada masa orde baru, komunikasi pembangunan lebih bersifat *top down*. Namun setelah era reformasi berubah menjadi *bottom up*. Pada masa orba, komunikasi pembangunan lebih difokuskan pada paradigma komunikasi yang bersifat tradisional. Paradigma ini berakar pada ideologi modernisasi dan pendekatan yang digunakan adalah difusi inovasi. Sedangkan pada era reformasi bergeser pada paradigma kontemporer yaitu yang berakar pada ideologi multiplisitas pembangunan. Pendekatannya lebih pada partisipasi demokrasi.

Berdasar data kualitatif, tergambar bahwa fenomena yang dihadapi pada KIM Palasari, terletak

pada fungsi dan pola komunikasi yang lebih didasarkan pada kebiasaan (*social cultur*) yang dianut selama ini, tanpa beradaptasi dengan dinamika informasi dan pola komunikasi dalam menghadapi program swasembada pangan. Secara umum keberadaan KIM ini diperlukan suatu konsep komunikasi yang lebih terarah, profesional, dan lebih beradaptasi dengan pemanfaatan TIK baik di intern komunikasi ataupun ekstern (komunikasi dengan berbagai pihak). Sebab bila tidak disikapi secara serius program ini dari sekarang oleh seluruh masyarakat termasuk KIM Palasari, akan terjadi gangguan ketersediaan pangan di masa akan datang. Kuswarno mengungkapkan, di era 2000an, konsepsi masalah dinamika informasi dan komunikasi sekarang ini, semakin luas, sesuatu yang langka, unik, berbeda, dan belum pernah ada atau sedikit orang yang menyesuainya, fenomena tersebut sekaligus menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dan harapan, yakni kondisi yang belum memuaskan pada kelompok-kelompok masyarakat lainnya (Mulyana dan Solatun:2000).

Tabel 2 Peran Elemen Sosial (*Stakeholders*) dalam KIM Untuk Menyukkseskan Program Swasembada Pangan

Elemen Sosial (Stakeholders)	Peran Keterlibatan
Pemerintah	Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten Kota berperan dalam memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan (<i>empowerment</i>) KIM melalui aktifitas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing dalam menyukkseskan program swasembada pangan yang ditarget tiga tahun oleh pemerintah Jokowi.
Swasta	Memfasilitasi aktifitas KIM dalam aspek-aspek informasi dan komunikasi terutama dalam pengembangan usaha masyarakat, meliputi kemitraan usaha, dukungan modal, pengembangan SDM dan pemasaran hasil produksi KIM, sehingga masyarakat dapat diberdayakan melalui aktifitas KIM ini.
Media Massa (Pers)	Mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk media massa, maka kualitas informasi yang disajikan akan memengaruhi akses informasi oleh KIM. Oleh karena itu diperlukan peranan media dalam merekonstruksi isi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Diharapkan media lokal atau media komunikasi memiliki program memberdayakan KIM.
Lembaga Masyarakat	Seperti ormas dan lain sebagai agen pembahru dan inofator sangat penting dalam turut mengembangkan dan memberdayakan KIM. Diperlukan adanya perhatian dan kepedulian organisasi tersebut untuk bermitra dengan KIM dalam rangka <i>empowerment</i> informasi dan komunikasi masyarakat yang lebih baik.

Sumber: hasil wawancara 2015 (*diolah*)

Konsepsi komunikasi yang terungkap, adalah penguatan dan pemberdayaan kelembagaan KIM dalam kerangka pengembangan pola komunikasi yang lebih profesional, di mana salah satu pilarnya adalah komunikasi yang sinergi antara masyarakat dan para

stakeholder (pemerintah dan swasta), bahkan lebih dikembangkan lagi dengan institusi perguruan tinggi, pers, lembaga swadaya masyarakat. Seperti tergambar dari pola kebutuhan yang melibatkan berbagai elemen sosial seperti yang tergambar pada Tabel 2.

Kolaborasi/ kerjasama dengan mereka, akan terjadi transformasi informasi dalam meningkatkan produktivitas pangan yang menguntungkan, bagi petani akan berdampak peningkatan pengetahuan sekaligus diaplikasikan di lahan pertanian, dan bagi *stakeholder* sebagai *triger* pengembangan dan pengkajian yang diperoleh secara empirik ataupun teoritik.

Aspek pemberdayaan potensi sumberdaya manusia pada komunitas yang dimiliki bisa dikelola secara optimal, sekaligus dapat mencari figur-figur yang ideal dalam struktur kepengurusannya. Disamping menguasai dalam berkomunikasi (TIK dan intelektual), juga mampu meningkatkan kesadaran publik dan memahami dinamika swasembada pangan. Hal ini sesuai dengan teori kehadiran sosial dari

Griffin:2006, komunikasi efektif bila memiliki *opinion leadership* yang sesuai dengan kehadiran sosial yang dibutuhkan untuk tingkat keterlibatan interpersonal yang diperlukan. komunikasi tatap muka dalam kelompok dianggap memiliki kehadiran sosial yang ditulis atau komunikasi berbasis media baru, adalah yang masih rendah. Asumsi teori ini (*social presence theory*) ialah kedekatan seseorang dengan orang lain yang bergantung dari media apa yang digunakan untuk berinteraksi. Semakin tinggi kualitas interaksi yang didapat dari pemilihan media, maka semakin baik juga kedekatan interpersonalnya.

Berdasar kajian tersebut, pada Tabel 3 ditunjukkan dalam sebuah matrik beberapa penguatan paradigma pola komunikasi KIM dibanding dengan paradigma sebelumnya.

Tabel 3 Komparasi Paradigma Kelompok Informasi Masyarakat Saat Ini dengan *Empowerment*

Paradigma	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Empowerment
Tujuan	Menemukan masalah bersama melalui diskusi kelompok untuk selanjutnya di informasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat	KIM juga memberikan informasi dan komunikasi agar ada kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program swasembada pangan dari pemerintahan Jokowi-JK
Pola komunikasi	Dilakukan dengan pendekatan <i>top down</i> dan <i>bottom up</i> .	Diberikan keleluasan untuk berinisiasi dan berinovasi (<i>laize faire</i> /sepenuhnya diserahkan kepada anggota: dari, oleh, dan untuk anggota masyarakat)
Dalam kerjasama	Lebih ditekankan pada aspek kerjasama dengan <i>stakeholder</i> pemerintahan pusat dan daerah (sebagai mitra kerja pemerintah) serta komunitas setempat.	Selain dengan <i>stakeholder</i> , ketua KIM dan anggota sepenuhnya diserahkan untuk memperluas kerjasama dengan melibatkan unsur swasta, perguruan tinggi, pers, lembaga swadaya dan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan profesional.
Sarana komunikasi	TIK sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa .	Pemanfaatan TIK secara optimal sebagai akses informasi (<i>networking</i>) yang merupakan hubungan antar KIM atau antara anggota yang secara teratur dalam rangka saling tukar menukar informasi.

Berdasarkan hasil kajian, untuk menggambarkan pola komunikasi KIM yang bisa diadaptasikan pada program swasembada pangan memerlukan pengkodisian suatu kelompok masyarakat ini. Hal ini tidak lepas dari konteks yang ada di lapangan, di mana telah terjadi *gap* yang cukup signifikan antara masyarakat satu dengan yang lain. Berbagai kategori yang ditemukan dalam data kualitatif disusun untuk menemukan konsep yang dipandang penting sebagai bagian yang saling terkait dengan program swasembada pangan, disamping dengan konsep yang sudah ada sebelumnya.

Program ini, diperlukan model komunikasi atau paradigma khusus untuk memberikan solusi terbaik untuk memecahkan persoalan, bukan sekedar

memberi informasi tanpa ada kelanjutan, tetapi dalam tataran peningkatan koordinasi dan tata cara dalam proses komunikasi dengan berbagai pihak yang kompeten.

Kompetensi dari pihak-pihak yang *concern* terhadap informasi dan komunikasi program di bidang pangan mutlak diperlukan oleh komunitas KIM dalam memberi *pengkayaan (enrichmen)* dan pemahamannya (*cognition*), terutama pada posisi ketua kelompoknya di satu pihak dan anggota kelompok di pihak lain. Berdasarkan hasil proses komunikasi yang terjadi di dalamnya, maupun bagaimana anggota masyarakat dengan ketua kelompok memaknai keberhasilan dalam organisasi. Baik dalam jaringan pola komunikasi kelompok

berupa bintang, roda atau segitiga sesuai dengan aliran yang dikemukakan oleh Pace&Faules (2010), bahwa pola yang lebih terarah dalam wadah KIM adalah dengan mengarahkan seluruh informasi kepada seluruh anggota yang menduduki posisi sentral, orang yang dalam posisi sentral semua anggota berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian bagi anggota masyarakat yang kurang memiliki orientasi yang kuat tentang urgensi program pemerintah, akan ada perubahan *mindset* atau cara berpikir yang lebih baik. Hal ini terkait dengan tipe dan gaya komunikasi anggota yang tunduk di bawah komunikasi linear secara *top down* ataupun *bottom up* dalam kelompok. Disamping memiliki gaya komunikasi lugas, setidaknya memberi ruang munculnya ide-ide kreatif dari anggota, dan secara tidak langsung memberi spirit baru bagi anggota komunitas KIM untuk ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungannya (*sustainable*). Dari tiga model komunikasi yang dikemukakan Mulyana (2000), yaitu model awal, model dengan pendampingan profesional, dan model dengan mengembangkan kepemimpinan kelompok yang demokratis, yang semuanya dikategorikan sebagai model verbal. Dalam konteks penguatan wadah komunitas KIM seperti dikemukakan sebelumnya, kategori pola komunikasi yang ideal adalah model pendampingan secara profesional/kompeten, di mana peran posisi pimpinan kelompok komunitas dituntut gaya komunikasi yang lugas untuk memberikan semangat kepada anggotanya dan masyarakat.

Tuntutan profesionalisme organisasi dalam proses komunikasi, maka peran dari pendamping dari *stakeholder* yang kompeten sesuai dengan bidangnya (pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, swasta, dan lainnya) menjadi sangat penting, untuk memberikan pemahaman yang benar dan persepsi yang sama diantara orang-orang yang terlibat dalam aktivitas KIM. Disamping itu prinsip kehati-hatian dari pengurus organisasi dan pemangku kepentingan, harus mendapat pengetahuan yang sama pada tataran teori dan juga memiliki persepsi yang sama dalam menerjemahkan dalam implementasi pada berbagai kegiatan yang ada di lapangan. Serta harmoni dan hubungan diantara kedua pihak baik dari sisi internal masyarakat anggota dengan ketua ataupun dengan pendamping haruslah dijaga.

Mengarahkan berbagai kegiatan kelompok sangat dituntut demi keberhasilan model ini, sehingga komunikasi kelompok yang terjadi mengarahkan pada

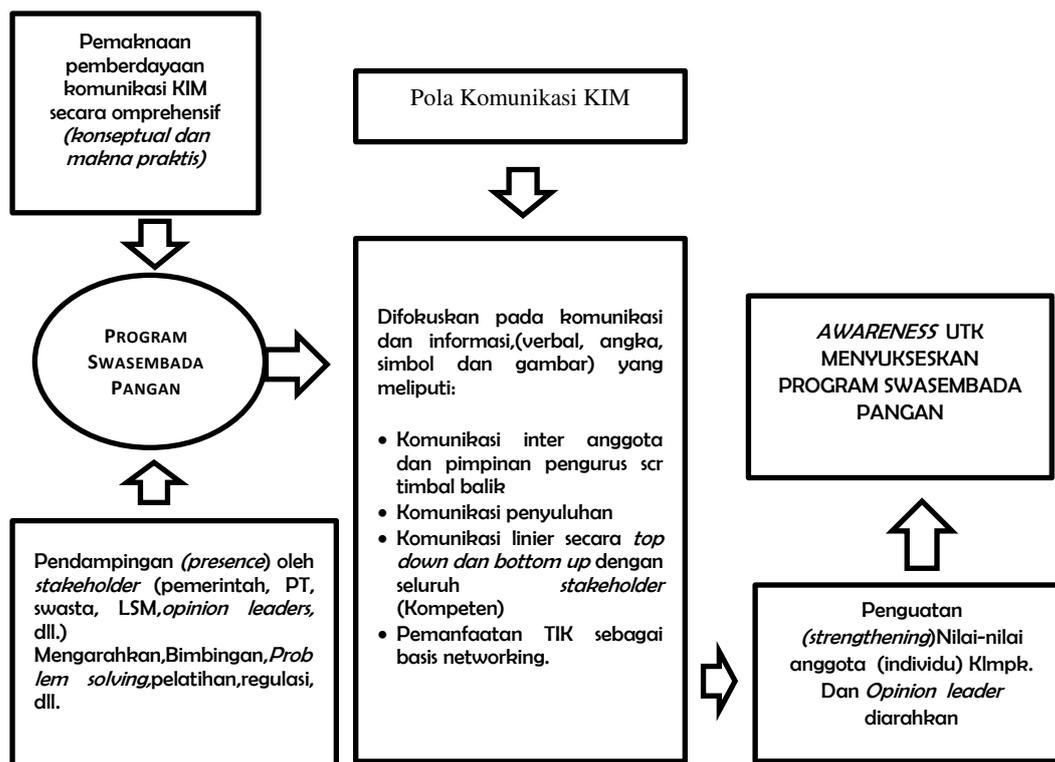
berbagai objek kegiatan yang seharusnya ada dalam suatu kelompok. Komunikasi tidak hanya terfokus pada sekedar informasi dan komunikasi saja, tetapi diikuti motivasi kuat untuk diaplikasikan di lapangan.

Penguatan pola komunikasi dalam komunitas KIM, secara komprehensif harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati, terutama kalau itu menyangkut dengan perbaikan organisasi yang lebih diterima masyarakat. Hal ini karena menyangkut tentang perubahan paradigma lama ke baru yang memerlukan interval waktu yang tidak sebentar, apalagi masalah gaya kultur komunikasi antara yang satu dengan yang lain berlainan. Dengan penguatan seperti itu, *mindset* masyarakat yang menyikapi program swasembada pangan yang biasa-biasa saja, menjadi sadar akan pentingnya ketahanan pangan di masa datang.

Berdasar pada kajian tersebut, maka dapat digambarkan pola komunikasi untuk pemberdayaan KIM dalam menyukseskan program swasembada pangan seperti Gambar 3. Model komunikasi pemberdayaan KIM dalam menyukseskan program swasembada pangan diperlukan suatu sistem pendampingan secara profesional dan terarah dari para *stakeholder* yang berkompeten. Dengan penekanan model tersebut, bagaimana fungsi pendamping KIM untuk bisa mengawal secara terarah dengan berbagai sarana komunikasi yang ada.

Hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh para *stakeholder* adalah bagaimana menerapkan konsep pemberdayaan sebagai pilihan pendekatan komunikasi, agar selaras mulai dari tataran konseptual sampai tataran praktisnya, sehingga bisa diikuti oleh seluruh anggota masyarakat dalam komunitas KIM tersebut. Dalam praktek di lapangan, usaha untuk menyukseskan swasembada pangan ini adalah hal utama (*urgen*) dilakukan, karena itu diperlukan aksi bersama dan pengawalan kegiatan dalam kesatuan bahasa antara konsep dan praktek di lapangan.

Media komunikasi dalam komunitas daerah/lokal dapat dikoordinir oleh pusat kegiatan masyarakat setempat ataupun berada di bawah naungan pemerintah/ organisasi masyarakat sebagai fasilitator yang berkompeten dalam menggerakkan program swasembada pangan. Media komunikasi dan informasi dalam komunitas muncul sebagai reaksi individu, masyarakat dan lembaga pemerintahan atau swasta terhadap permasalahan lahan pertanian yang semakin berkurang, karena adanya penambahan penduduk yang tidak terkendali serta berkurangnya minat masyarakat untuk bertani.



Gambar 3 Pola Komunikasi Untuk Penguatan/Pemberdayaan KIM

Menggerakkan kelompok masyarakat di tengah-tengah minimnya sumber daya manusia di daerah ini, kurangnya tenaga yang berkompeten dalam penguasaan media TIK (*online*) sebagai perangkat utama komunikasi dan informasi, hal ini karena mereka belum merasa tersentuh dengan kemajuan TIK dalam menunjang produktifitas dan hasil pertanian yang maksimal. Oleh karena itu seluruh masyarakat yang berkepentingan harus berinisiasi dan sadar akan urgensi komunitas yang digalang, selain institusi lainnya yang lebih dulu eksis, seperti yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kelompok Informasi Masyarakat lainnya, petugas penyuluh pertanian, dinas pertanian daerah dan lainnya. Di mana komunitas masyarakat yang tergabung dalam forum ini, lebih dahulu mendayagunaan media *online* sebagai konsekwensi kemajuan TIK.

Dukungan media TIK dalam aktifitas KIM akan memudahkan transformasi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh seluruh anggotanya, serta memberikan terpaan yang memadai bagi masyarakat sekitar. Sebaliknya, peran KIM akan ditinggalkan masyarakat bila masyarakatnya itu sendiri lebih dinamis dalam memanfaatkan media TIK sebagai sumber informasi. Begitu pula dari aspek komunikasi, seluruh pengurus dan anggota KIM dituntut untuk

bisa menguasai pola komunikasi yang lebih persuasif dan timbal balik kepada masyarakat, sehingga keberadaannya lebih dapat diterima dengan kelompok informasi lainnya.

KESIMPULAN

Pola komunikasi untuk pemberdayaan KIM dalam menyukseskan program swasembada pangan sesuai yang dicanangkan Presiden Joko Widodo adalah pola atau model komunikasi dengan sistem pendampingan yang lebih terarah dari seluruh *stakeholders*, serta bisa mengembangkan komunikasi kelompok yang lebih demokratis kepada para anggotanya. Disamping itu, dalam pemberdayaannya diperlukan komunikasi linier yang sinergis baik secara *top down* ataupun *bottom up* dengan para *stakeholders* yang ada di daerah sesuai dengan kompetensi dibidangnya untuk memberikan pemahaman yang benar dalam berkomunikasi.

Untuk merekonstruksi lembaga KIM adalah menerapkan konsep pemberdayaan sebagai pilihan pendekatan komunikasi, lebih selaras mulai dari tataran konseptual sampai tataran praktisnya, sehingga bisa diikuti oleh seluruh anggota masyarakat dalam komunitasnya. Usaha untuk menyukseskan swasembada pangan diperlukan *action* bersama dan pengawalan kegiatan dalam kesatuan bahasa antara konsep dan praktek di lapangan.

Pola pemberdayaan KIM dalam menyukseskan program swasembada pangan, hendaknya dilakukan dalam suatu kerjasama yang sinergi dengan seluruh *stakeholders* (Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, Perguruan Tinggi, pers dan lain-lain). Oleh karena itu figur yang ideal memimpin lembaga KIM di masa mendatang adalah yang menguasai prinsip-prinsip komunikasi yang baik serta dalam penguasaan TIK sebagai sarana penunjang meningkatkan kesadaran publik dan memahami dinamika kebutuhan akan pangan di masa datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, penelitian ini dapat saya selesaikan sesuai *timeline* yang ditentukan. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada kelompok peneliti di ruangan saya berada dan para pejabat struktural beserta staf di lingkungan BPPKI Bandung. Terkhusus juga, saya sampaikan kepada Drs. Nana Suryana (purna bakti bulan Mei 2015 lalu) yang sering berdiskusi dan berdebat dalam menyusun riset disain ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Susi Sugiarsi Ketua Pengurus KIM Palasari yang sangat perhatian pada penelitian ini, begitu pula kepada para tokoh formal dan non formal di Desa Palasari, Kota Bandung. Terakhir, tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada Redaksi Pekommas BBPPKI Makasar yang menerbitkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Griffin, EM. (2006). *Communication Theory*, Singapore, Mc. Graw Hill.

- Guddykunst, W. B. (2003). *Cross Cultural and Intercultural Communication: Introduction*. In *Thousand Oaks, CA. Second Edition: Sage Publication*.
- Hariadi. (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indardi. (2013). *Komunikasi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tani/Communication For Empowering Farmer Community (Studi Kasus Dalam Kelompok Tani Di Desa Argorejo Sedayu, Kab. Bantul*. Desertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu komunikasi Universitas Pajajaran Bandung. Bandung).
- Kemenkominfo.(2011). *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. Edisi4/November/2011. *Ketahanan Pangan Dalam Perubahan Iklim Global*. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Direktorat Pengelolaan Media Publik.
- Lionberger, HF and Paul H. Gwin. (1982). *Communication strategies: Aguide for Agricultural Change Agent*. USA:IPP Inc.
- Mulyana, D. Solatun. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis*. Bandung: Reaja Rosdakarya
- Munthe, A.G. (1999). *Hubungan antara Kemampuan Manajerial Kepala Desa dengan Peningkatan partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal*. Disertasi Ilmu Sosial. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Pace, R.W dan Faules, F.D. (2010). *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kerja Perusahaan*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 *Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial*.
- Syam, N.W.(2002). *Format Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Bandung: materi Kuliah.
- Suhardiyono,L. (1992). *Penyuluhan: Petunjuk Bagi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Penerbit Alfabeta
- Yin, R.K. (2005). *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Halaman ini sengaja dikosongkan